

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 4, Telepon (0352) 481 845

Fax (0352) 481 845, Kode Pos 63413

Website: <https://bappedalitbang.ponorogo.go.id>, Email: bappedaponorogoku@gmail.com

PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.45/ 016 /405.27/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, maka perlu menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Fungsional dan seluruh Staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO



Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680413 198809 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa tantangan dan kompleksitas pembangunan yang semakin tinggi memerlukan kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja ini kami telah menetapkan program dan kegiatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas perencanaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO**



Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413 198809 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Evaiuasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	TC. 29	14
Tabel 2.2	TC. 30	21
Tabel 2.4	TC. 31	24
Tabel 2.5	TC. 33	40
Tabel 2.6	Usulan Program/Kegiatan Rencana Kerja	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja SKPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah Penguatan kapasitas penciptaan nilai tambah produk pertanian sebagai pendukung industri pengolahan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Acuan Renja Bappeda Tahun 2024 adalah Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Litbang Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 6402);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
- 23) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda litbang tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda litbang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda Litbang tahun 2021-2026;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
4. Pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
5. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

- a) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

- d) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- d) Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD . TC 31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2021-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2024

3.3. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan usulan Program / Kegiatan rencana kerja per organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan RENJA, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas , pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya dalam kurun waktu tertentu.

Skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel. TC. 29

**Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai	95 %		95 %	95%	100 %	90 %	95 %	100 %
5.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	90%		95 %	90 %	95 %	95%	90 %	100 %
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, RKA)	1 Laporan		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	90 %		90%	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan pelayanan umum kantor	3 Dokumen		3 Dok	3 Dok	100 %	3 Dok	3 Dok	100 %
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan keuangan	5 Dok		5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	5 Dok	100 %
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	90 %		90%	90%	100%	90%	90%	100%
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional	65 Paket		65 Penerima	65 Penerima	100 %	65 Orang	65 Penerima	84.62 %
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang		12 Orang	12 Orang	100 %	-	12 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95 %		95%	95%	100%	90%	95%	100%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	79 Item		79 Item	79 Item	100 %	79 Item	79 Item	100 %
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	24 Penerima		24 Penerima	24 Penerima	100 %	24 Penerima	24 Penerima	100 %
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12870 Orang		12870 Orang	12870 Orang	100%	12870 Orang	12870 Orang	100%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 Item		8 Item	8 Item	100 %	5 Buah/bulan	8 Item	100 %
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 Dokumen		5 Buah Perbulan	5 Buah Perbulan	100 %	5 Buah/bulan	5 Buah Perbulan	100 %
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	2 Laporan		2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95 %		95%	95 %	100%	95 %	95 %	100 %
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan peralatan perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah									
		Prosentase pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah tepat waktu	95 %		95%	95%	100 %	95%	95%	100 %
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1500 surat masuk 1200 Surat Keluar		1500 surat masuk 1200 Surat Keluar	1500 surat masuk 1200 surat keluar	100 %	1500 surat masuk 1200 surat keluar	1500 surat masuk 1200 surat keluar	100 %
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pengadaan peralatan, perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95 %		95%	95%	100%	90%	95%	100%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	79 Item		79 Item	79 Item	100 %	79 Item	79 Item	100 %
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	24 Penerima		24 Penerima	24 Penerima	100 %	24 Penerima	24 Penerima	100 %
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan fasilitas kunjungan tamu	12870 Orang		12870 Orang	12870 Orang	100%	12870 Orang	12870 Orang	100%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 Item		8 Item	8 Item	100 %	5 Buah/bulan	8 Item	100 %
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 Dokumen		5 Buah Perbulan	5 Buah Perbulan	100 %	5 Buah/bulan	5 Buah Perbulan	100 %
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	2 Laporan		2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95 %		95%	95 %	100%	95 %	95 %	100 %
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan peralatan perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Prosentase pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah tepat waktu	95 %		95%	95%	100 %	95%	95%	100 %
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1500 surat masuk 1200 Surat Keluar		1500 surat masuk 1200 Surat Keluar	1500 surat masuk 1200 surat keluar	100 %	1500 surat masuk 1200 surat keluar	1500 surat masuk 1200 surat keluar	100 %
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pengadaan peralatan, perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan							
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Baarng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95 %		95%	95%	100 %	90%	95%	100 %
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelayanan pajak kendaraan dinas / operasional	Mobil jumlah 6 unit Sepeda motor (roda dua)Jumlah 22 unit		Mobil jumlah 6 unit Sepeda motor (roda dua)Jumlah 22 unit	Mobil jumlah 6 unit Sepeda motor (roda dua)Jumlah 22 unit	100 %	Mobil jumlah 6 kendaraan Sepeda motor (roda dua)Jumlah 22 Kendaraan	Mobil jumlah 6 unit Sepeda motor (roda dua)Jumlah 22 unit	100 %
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara	7 Jenis		2 Laporan	2 Laporan	100%	7 Jenis	2 Laporan	100%
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	2 Laporan		7 Jenis	4 Jenis	80%	2 Laporan	4 Jenis	100 %
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
		Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan	92 %		92%	92%	100 %	80 %	92%	100 %
		Prosentase Efektifitas Capaian Sasaran Pembangunan	90 %		90%	90%	100%	90%	90%	100%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase Usulan Yang Diakomodir Didokumen Perencanaan	92 %		92 %	92 %	100 %	92 %	92 %	100 %
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta konsultasi publik RPJMD yang hadir	80 Peserta		-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta konsultasi public RKPD yang hadir	70 peserta		80 Peserta	80 Peserta	100 %	80 Peserta	80 Peserta	100 %
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPd yang disusun	1 Dok		1 dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %
		Jumlah dokumen perubahan RKPd yang disusun	2 Dok		1 dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100 %
		Jumlah SKPD yang dikoordinasikan entry sistem informasi perencanaan dan penganggaran	84 %		2 SKPD	2 SKPD	100 %	2 SKPD	2 SKPD	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kecamatan yang dikoordinasikan entry sistem informasi perencanaan dan penganggaran			21 dok	21 Dok	100 %	21 Dok	21 Dok	100 %
5.01.02.2.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan Forum Perangkat Daerah	3 Berita Acara		26 SKPD	26 SKPD	100 %	26 SKPD	26 SKPD	100 %
5.01.02.2.01.07	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang RKPD yang hadir	2 Berita Acara		400 Peserta	258 Peserta	80%	4 Berita Acara	258 Peserta	100%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras	84 %		84 %	84 %	100 %	84 %	84 %	100 %
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Di Verifikasi	47 dok		47 dok	47 dok	100 %	1 Laporan	47 dok	100 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Selaras	94 Dok		188 Dok	94 Dok	60 %	94 Dok	94 Dok	100 %
		Jumlah SKPD Yang Di Evaluasi Implementasi SAKIP (Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Capaian Kinerja)	47 SKPD		47 SKPD	47 SKPD	100 %	47 SKPD	47 SKPD	100 %
		Jumlah Indikator RPJMD/IKD Yang Tercapai	145 indikator		145 Indikator	145 indikator	100 %	145 Dok	145 indikator	100 %
		Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Per Tribunal Yang Disusun Tepat Waktu	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	100 %	2 Laporan	47 Laporan	2 dok
		Jumlah SKPD Yang Melaporkan Capaian Kinerjanya Tepat Waktu	47 SKPD		47 SKPD	47 SKPD	100%		47 SKPD	100 %
		Prosentase Rekomendasi Pengendalian Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD	90 %		100 %	25 %	25 %		25 %	100 %
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 dokumen		-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang RKPD yang hadir	2 Berita Acara		400 peserta	400 peserta	100 %	4 berita acara	400 peserta	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-						100 %
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %		92%	101%	100 %	92 %	101%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup bidang pemerintahan	29 SKPD		29 SKPD	29 SKPD	100 %	29 SKPD	29 SKPD	100 %
		Persentase rekomendasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	90%		90%	80%	90%	90 %	80%	100 %
		Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100 %	-	2 dokumen	100 %
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD dan lembaga	90 %		90 %	95 %	105 %	90 %	95 %	100 %
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	90 %		90 %	25 SKPD	100 %	7 SKPD	25 SKPD	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup sosial budaya	48 SKPD		48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	48 SKPD	100 %
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dibina	9 tatanan		9 tatanan	9 tatanan	100 %	9 tatanan	9 tatanan	100 %
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									
		Persentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	82 %		82 %	95 %	100 %	82 %	95 %	100 %
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	2 SKPD		2 SKPD	2 SKPD	100 %	2 SKPD	2 SKPD	100 %
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi perencanaan industry, perdagangan dan koperasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD	80 %		80 %	80 %	100%	80 %	80 %	100 %
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen penguatan ekonomi kreatif, industry perdagangan dan koperasi	-		-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program da Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen perencanaan industry,perdagangan dan koperasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90%
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen SKPD yang diasistensi	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah SKPD yang di monev	1 Laporan		1 SKPD	1 SKPD	100 %	1 SKPD	1 SKPD	100 %
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah dokumen SKPD yang selaras	-		-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									100 %
		Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	74 %		74 %	94 %	100 %	74 %	94 %	100 %
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup prasarana wilayah	1 Dokumen		1 SKPD	1 SKPD	100 %	1 SKPD	1 SKPD	100 %
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup SDA dan LH	1 Laporan		1 SKPD	1 SKPD	100 %	1 Dokumen	1 SKPD	100 %
		Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	200 Dokumen		3 SKPD	3 SKPD	100 %	3 SKPD	3 SKPD	100 %
		Jumlah desa yang dikoordinasikan	200 Desa		200 Desa	200 Desa	100 %	200 Desa	200 Desa	100 %
		Prosentase Rekomendasi perencanaan pengembangan wilayah yang ditindak lanjuti oleh SKPD	90 %		90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100%
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	90 %		90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									100 %
		Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti	90 %		90 %	104 %	100 %	90 %	104 %	100 %
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah indikator indeks daya saing daerah (IDSD)	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	90 %	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah NA ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang disusun	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	1 Laporan							
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan	90 %		90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan pengembangan pariwisata	Jumlah dokumen penyusunan FS monumen dan museum reog dan pengembangan telaga ngebel	-		-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen grand design pembangunan kependudukan yang disusun	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan pengembangan tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan tenaga kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	90 %	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan	90 %		90 %	90 %	100 %	1 Dokumen	90 %	100 %
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen PDRB tingkat Kecamatan yang disusun	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kajian pengembangan kawasan pertanian terpadu yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Jumlah FS pengembangan kawasan kopi dan kakao diselingkar wilis			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan selingkar wilis	-		-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun(2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah			90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan OPD	50 Inovasi		50 Inovasi	50 Inovasi	100 %	5 Produk	50 Inovasi	100 %
		Prosentase OPD yang melaporkan Inovasi pada Aplikasi IGA			80 %	80 %	100 %		80 %	100 %
		Prosentase Indikator IDSD yang terpenuhi	97 Indikator		97 Indikator	97 Indikator	100 %		97 Indikator	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan di Bappeda Litbang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Bappeda Litbang. Adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam tabel TC. 30

Tabel. TC. 30
Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
Perencanaan										
1	Indeks Kualitas Perencanaan	80,74	80,75	80,85	80,90	81,50	81,50	80,85	80,90	Tercapai
Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	80	85	90	95	85	85	90	95	Tercapai
2	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	45	50	55	60	50	50	55	60	Tercapai
3	Persentase implementasi rencana kelitbang	80	85	90	95	85	70	90	95	Tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja Bappeda Litbang adalah peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan, peningkatan keselarasan program kegiatan antar dokumen perencanaan dan Peningkatan capaian pelaksanaan Pembangunan.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
2. Membangun Perencanaan Daerah yang Kreatif, inovative dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Perlunya peningkatan SDM perencana;
4. Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi;
6. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh diterbitkannya peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021

tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Perbandingan Program/Kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel TC. 31
Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan (Renja SKPD)					
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda Litbang	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	95%	20.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	95%	20.000.000,00
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen dan laporan	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen dan laporan	1 Dokumen	10.000.000,00
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, RKA)	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, RKA)	1 Dokumen	10.000.000,00
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	5.751.838.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	5.751.838.000,00
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 dokumen	5.392.859.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 dokumen	5.392.859.000,00
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Litbang	Jumlah kegiatan pelayanan umum kantor	3 Dokumen	358.979.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Litbang	Jumlah kegiatan pelayanan umum kantor	3 Dokumen	358.979.000,00
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	-	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	90 %	0,00
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Litbang	Jumlah penerima pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional	-	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Litbang	Jumlah penerima pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional	65 orang	0,00

5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Litbang	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	0,00	Bappeda Litbang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Litbang	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	0,00
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95%	317.868.000,00	Bappeda Litbang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95%	317.868.000,00
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Litbang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	79 Paket	70.000.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Litbang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	79 Paket	70.000.000,00
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Litbang	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	24 paket	95.000.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Litbang	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	24 paket	95.000.000,00
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda Litbang	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12870 Orang	23.608.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda Litbang	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12870 Orang	23.608.000,00
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Perundang-undangan	Bappeda Litbang	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	5 Paket	25.000.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Bappeda Litbang	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	5 Paket	25.000.000,00
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda Litbang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 Dokumen	6.760.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda Litbang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 Dokumen	6.760.000,00
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Litbang	Jumlah rapat – rapat koordinasi dalam daerah dan rapat – rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	2 Laporan	97.500.000,00	Bappeda Litbang	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Litbang	Jumlah rapat – rapat koordinasi dalam daerah dan rapat – rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	2 Laporan	97.500.000,00
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%	18.420.000,00	Bappeda Litbang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%	18.420.000,00
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Litbang	Jumlah laporan pengadaan peralatan, perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	4 laporan	18.420.000,00	Bappeda Litbang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Litbang	Jumlah laporan pengadaan peralatan, perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	4 laporan	18.420.000,00
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah tepat waktu	95 %	179.062.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah tepat waktu	95 %	179.062.000,00
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Litbang	Jumlah surat masuk yang dikelola	1500 surat	15.000.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Litbang	Jumlah surat masuk yang dikelola	1500 surat	15.000.000,00
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Litbang	Jumlah surat keluar yang dikelola	1200 surat	149.062.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Litbang	Jumlah surat keluar yang dikelola	1200 surat	149.062.000,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Litbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	15.000.000,00	Bappeda Litbang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Litbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	15.000.000,00

5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%	184.793.663,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%	184.793.663,00
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda Litbang	Jumlah pelayanan pajak kendaraan mobil dinas/oprasional	6 Unit	104.793.663,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda Litbang	Jumlah pelayanan pajak kendaraan mobil dinas/oprasional	6 Unit	104.793.663,00
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Litbang	Jumlah pelayanan pajak kendaraan sepeda motor dinas/oprasional	22 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Litbang	Jumlah pelayanan pajak kendaraan sepeda motor dinas/oprasional	22 Unit	
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Litbang	Jumlah laporan pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor, sarana prasarana penunjang Gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	7 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Litbang	Jumlah laporan pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor, sarana prasarana penunjang Gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	7 Unit	15.000.000,00
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda Litbang	Jumlah bangunan Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	65.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda Litbang	Jumlah bangunan Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	65.000.000,00
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan Yang Diakomodir Didokumen Perencanaan	80%	1.440.000.000,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan Yang Diakomodir Didokumen Perencanaan	80%	1.440.000.000,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang Diakomodir Didokumen Perencanaan	2 Berita Acara	30.000.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang Diakomodir Didokumen Perencanaan	2 Berita Acara	30.000.000,00
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda Litbang	Jumlah SKPD yang dikordinasikan Forum Perangkat Daerah	3 Berita Acara	35.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda Litbang	Jumlah SKPD yang dikordinasikan Forum Perangkat Daerah	3 Berita Acara	35.000.000,00
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Litbang	Jumlah peserta musrenbang RKPd yang hadir	400 orang	325.000.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Litbang	Jumlah peserta musrenbang RKPd yang hadir	400 orang	325.000.000,00
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen RKPd yang disusun	1 dokumen	1.050.000.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen RKPd yang disusun	1 dokumen	1.050.000.000,00

									Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah Data dalam system Informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah yang dikelola.			20.000.000,00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang		20.000.000,00
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam system Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah Data dalam system Informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah yang dikelola.	-		10.000.000,00	Pengelolaan Data dalam system Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Jumlah Data dalam system Informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah yang dikelola.	1 Dokumen 10.000.000,00
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah	Bappeda Litbang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	-		10.000.000,00	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah	Bappeda Litbang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	4 Dokumen 10.000.000,00
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	92%		1.076.555.771,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	92% 1.076.555.771,00
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92%		676.553.771,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92% 676.553.771,00
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup bidang pemerintahan	29 SKPD		157.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup bidang pemerintahan	29 SKPD 157.000.000,00
			Prosentase rekomendasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	90%					Prosentase rekomendasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh SKPD	90%
			Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 Dokumen					Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 Dokumen
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Litbang	Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	1 Laporan		31.500.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Litbang	Prosentase usulan bidang social budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	1 Laporan 31.500.000,00
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	1 Dokumen		211.553.771,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang	Prosentase usulan bidang social budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	1 Dokumen 211.553.771,00

5 01 03 2.01 07	Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Litbang	Prosentase usulan bidang social budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	1 Laporan	26.500.000,00	Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Litbang	Prosentase usulan bidang social budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	1 Laporan	26.500.000,00
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Litbang	Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dibina	1 Laporan	250.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Litbang	Jumlah tatanan kabupaten sehat yang kabupaten sehat yang dibina	1 Laporan	250.000.000,00
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	82%	175.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	82%	175.000.000,00
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	40.000.000,00
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Laporan	30.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Laporan	30.000.000,00
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	25.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	25.000.000,00
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	40.000.000,00
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	20.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Dokumen	20.000.000,00

5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Laporan	20.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Litbang	Prosentase Usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	1 Laporan	20.000.000,00
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	74%	225.002.000,00	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	74%	225.002.000,00
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	1 SKPD	70.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	1 SKPD	70.000.000,00
5.01.03.2.03.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	1 Laporan	1.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	1 Laporan	1.000,00
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	1 Laporan	45.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	1 Laporan	45.000.000,00
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar	1 Dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar	1 Dokumen	
			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	3 SKPD	65.000.000,00			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	3 SKPD	65.000.000,00
			Jumlah desa yang dikoordinasikan	200 Desa				Jumlah desa yang dikoordinasikan	200 Desa	
			Prosentase Rekomendasi perencanaan pengembangan wilayah yang ditindak lanjuti oleh SKPD	90%				Prosentase Rekomendasi perencanaan pengembangan wilayah yang ditindak lanjuti oleh SKPD	90%	
5.01.03.2.03.0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	74 %	1.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Litbang	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	74 %	1.000,00
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Bappeda Litbang	Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	90%	45.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Bappeda Litbang	Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	90%	45.000.000,00

	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Litbang	SDA dan LH yang ditindak lanjuti		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bappeda Litbang					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bappeda Litbang			1.025.000.000,00
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda Litbang		90%			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda Litbang	Persentase hasil Penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan Pembangunan	90%	1.025.000.000,00
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda Litbang		97 indikator			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda Litbang	Persentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	97 indikator	150.000.000,00
5.05.02.2.01.1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda Litbang		1 dokumen			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda Litbang	Persentase hasil Penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 dokumen	150.000.000,00
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda Litbang		90%			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda Litbang	Persentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan	90%	310.000.000,00
5.05.02.2.02.0 9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda Litbang		1 dokumen			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda Litbang	Persentase Hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan	1 dokumen	150.000.000,00
5.05.02.2.02.0 9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bappeda Litbang		1 Dokumen			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bappeda Litbang	Persentase Hasil Penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen	160.000.000,00
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappeda Litbang		90%			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappeda Litbang	Persentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan	90%	310.000.000,00
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda Litbang		1 dokumen			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda Litbang	Jumlah dokumen Kajian pengembangan kawasan pertanian terpadu yang disusun	1 dokumen	150.000.000,00
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang		1 dokumen			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang	Jumlah FS Pengembangan kawasan kopi dan kakao di selingkar Willis	1 Dokumen	160.000.000,00

5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah	90 %	255.000.000,00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi daerah	90 %	255.000.000,00
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang dihasilkan OPD	50 Inovasi	255.000.000,00	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang dihasilkan OPD	50 Inovasi	255.000.000,00
		Prosentase OPD yang melaporkan inovasi pada aplikasi GA	80 %			Prosentase OPD yang melaporkan inovasi pada aplikasi GA	80 %	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo melakukan proses perencanaan program dan kegiatan dengan sistem partisipatif, selaras, dan efektif yang didukung oleh hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berbasis pada kepentingan masyarakat, didukung dengan ketepatan waktu dan keselarasan dengan dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang berkualitas dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menurut visi dan misi sebagai berikut:

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian PPN/Bappenas.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantuan, evaluasi, dan kajian / evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang.

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan SKPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Tujuan SKPD akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.

Dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 1 Bupati terpilih yaitu “membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah” dengan tujuan “mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah” Adapun sasaran misi kesatu yang turut menjadi tanggungjawab Bappeda Litbang adalah sasaran ke 2 yaitu “meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas”

Seiring dengan rumusan sasaran RPJMD tersebut, maka Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut:

“ Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif didukung oleh hasil penelitian”

Sasaran SKPD merupakan penjabaran tujuan SKPD yang secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan SKPD. Sesuai dengan Sasaran Strategis yg telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD 2021-2026 maka Sasaran Renja SKPD untuk tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Ponorogo mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 sebanyak 4 program dan 17 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- a. Penyusunan Perencanaan Pendanaan
 - 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 2. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi

Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel TC. 33 berikut:

Tabel.TC 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Ponorogo

Nama SKPD : Bappeda Litbang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10
					6.097.219.334				8.894.598.223
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kabupaten Ponorogo	95%	10.000.000			95%	20.000.000
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	Kabupaten Ponorogo	1 dokumen	5.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, RKA)	Kabupaten Ponorogo	1 dokumen	5.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kabupaten Ponorogo	90%	5.014.130.900	DAU		90%	5.229.740.000
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan	Kabupaten Ponorogo	5 Dokumen	4.652.731.000	DAU		5 Dokumen	5.229.740.000

5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan pelayanan umum kantor	Kabupaten Ponorogo	3 Dokumen	361.399.900	DAU	3 Dokumen	361.399.900
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi	Kabupaten Ponorogo	90%	39.000.000	DAU	90%	0.000
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional	Kabupaten Ponorogo	65 Orang	39.000.000	DAU	65 Orang	0.000
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Ponorogo	12 Orang	0.000	DAU	12 Orang	0.000
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Kabupaten Ponorogo	95%	537.080.334	DAU	95%	465.000.000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Ponorogo	79 item	95.000.000	DAU	79 item	70.000.000
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	Kabupaten Ponorogo	24 penerima	109.108.334	DAU	24 penerima	95.000.000
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Ponorogo	12870 Orang	176.472.000	DAU	12870 Orang	167.500.000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Ponorogo	8 item	25.000.000	DAU	8 item	25.000.000
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kabupaten Ponorogo	5 Bauh/ Bulan	28.500.000	DAU	5 Bauh/ Bulan	10.000.000

5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat – rapat koordinasi dalam daerah dan rapat – rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Kabupaten Ponorogo	2 Kali	103.000.000	DAU	2 Kali	97.500.000
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kabupaten Ponorogo	95%	38.100.000		95%	0.000
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pengadaan peralatan,perengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	Kabupaten Ponorogo	4 laporan	38.100.000		4 laporan	0.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah tepat waktu	Kabupaten Ponorogo		167.000.000	DAU		234.000.000
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk yang dikelola	Kabupaten Ponorogo	1500 surat	8.000.000	DAU	1500 surat	15.000.000
		Jumlah surat keluar yang dikelola		1200 surat			1200 surat	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Ponorogo	1 tahun	159.000.000	DAU	1 tahun	159.000.000
5.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Ponorogo	-	0.00	DAU	1 laporan	60.000.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	Kabupaten Ponorogo	95%	291.908.100		95%	274.793.663
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelayanan pajak kendaraan mobil dinas/operasional	Kabupaten Ponorogo	6 Unit	187.200.100	DAU	6 Unit	194.793.663
		Jumlah pelayanan pajak kendaraan sepeda motor dinas/operasional		22 Unit			22 Unit	

5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor, sarana prasarana penunjang Gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	Kabupaten Ponorogo	2 Laporan	35.020.000	2 Laporan	15.000.000
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Kabupaten Ponorogo	7 Jenis	69.688.000	7 Jenis	65.000.000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Usulan Yang Diakomodir Di Dokumen Perencanaan	Kabupaten Ponorogo		1.095.000.000		1.712.625.000
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Yang Diakomodir Di Dokumen Perencanaan	Kabupaten Ponorogo	80%	925.000.000	80%	1.440.000.000
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kabupaten Ponorogo		25.000.000	2 Berita Acara	30.000.000
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang dikordinasikan Forum Perangkat Daerah	Kabupaten Ponorogo	26 PD	35.000.000	26 PD	35.000.000
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta musrenbang RKPD yang hadir	Kabupaten Ponorogo	400 orang	200.000.000	400 orang	325.000.000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	Kabupaten Ponorogo	1 dokumen	665.000.000	1 dokumen	1.050.000.000
		Jumlah dokumen Perubahan RKPD yang disusun		1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah SKPD yang dikordinasikan entry sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran		26 PD		26 PD	
		Jumlah Kecamatan yang dikordinasikan entry sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran		21 Kecamatan		21 Kecamatan	

5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras	Kabupaten Ponorogo	84%	170.000.000	84%	252.625.000
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Di Verifikasi	Kabupaten Ponorogo	47 Dokumen	30.000.000	47 Dokumen	125.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Selaras		188 Dokumen		188 Dokumen	
		Jumlah SKPD Yang Di Evaluasi Implementasi SAKIP (Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Capaian Kinerja)		47 PD		47 PD	
		Jumlah Indikator RPJMD/IKD Yang Tercapai		145 Indikator		145 Indikator	
		Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD		1 Dokumen		1 Dokumen	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Per Triwulan Yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Ponorogo	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	127.625.000
		Jumlah SKPD Yang Melaporkan Capaian Kinerjanya Tepat Waktu		47 PD		47 PD	
		Prosentase Rekomendasi Pengendalian Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD		100%		100%	
5.01.02.2 .04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						20.000.000,00
5.01.02.2 .04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			DAU	1 laporan	10.000.000,00
5.01.02.2 .04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			DAU	4 laporan	10.000.000,00

5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Kabupaten Ponorogo	92%	966.200.000	DAU	92%	1.076.535.771
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kabupaten Ponorogo	92%	591.200.000		92%	676.533.771
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup bidang pemerintahan	Kabupaten Ponorogo	29 SKPD	87.000.000		29 SKPD	157.000.000
		Prosentase rekomendasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh SKPD		90%			90%	
		Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan		2 Dokumen			2 Dokumen	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Prosentase rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD dan lembaga	Kabupaten Ponorogo	90%	31.500.000	DAU	90%	31.500.000
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	Kabupaten Ponorogo	7 SKPD	196.200.000	DAU	7 SKPD	211.553.771
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup sosial budaya	Kabupaten Ponorogo	48 SKPD	26.500.000		48 SKPD	26.500.000
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dibina	Kabupaten Ponorogo	9 tatanan	250.000.000		9 tatanan	250.000.000

5.01.03 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup SDA dan LH	Kabupaten Ponorogo	1 SKPD	60.000.000	DAU	1 SKPD	70.000.000
		Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar		1 Dokumen			1 Dokumen	
5.01.03.2 .03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							0.000
5.01.03 2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	Kabupaten Ponorogo	90%	40.000.000	DAU	90%	45.000.000
		Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar		1 Dokumen			1 Dokumen	
5.01.03.2 .03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup prasarana wilayah				DAU	1 SKPD	1.000
5.01.03 2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	Kabupaten Ponorogo	3 SKPD	60.000.000	DAU	3 SKPD	65.000.000
		Jumlah desa yang dikoordinasikan		200 Desa			200 Desa	
		Prosentase rekomendasi perencanaan pengembangan wilayah yang ditindak lanjuti oleh SKPD		90%			90%	
5.01.03.2 .03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Ponorogo			DAU	1 laporan	1.000

5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	Kabupaten Ponorogo	90%	40.000.000	90%	45.000.000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				715.000.000		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Hasil Penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan Pembangunan</i>	Kabupaten Ponorogo	90%	865.000.000	90%	1.025.000.000
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah indikator indeks daya saing daerah (IDSD)		97 indikator	150.000.000	97 indikator	150.000.000
5 05 02 2.01 06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketramtaman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah NA keertiban umum dan ketertaman masyarakat yang disusun	Kabupaten Ponorogo	1 dokumen	0.000	1 dokumen	0.00
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Kabupaten Ponorogo		150.000.000		150.000.000
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan		90%	150.000.000	90%	310.000.000
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Ponorogo		150.000.000	1 dokumen	150.000.000
5 05 02 2.02 07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang disusun	Kabupaten Ponorogo	1 dokumen	0.000	1 dokumen	-
5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Ponorogo			1 dokumen	160.000.000

5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan	90%	310.000.000	DAU	90%	310.000.000
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen PDRB tingkat Kecamatan yang disusun	1 dokumen	0.000	DAU	1 dokumen	-
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	150.000.000	DAU	1 dokumen	150.000.000
		Jumlah FS Pengembangan kawasan kopi dan kakao di selingkar willis	1 dokumen			1 dokumen	
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	160.000.000	DAU	1 dokumen	160.000.000
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi daerah	90%	255.000.000	DAU	90%	255.000.000
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan OPD	50 Inovasi	255.000.000	DAU	50 Inovasi	255.000.000
		Prosentase OPD yang melaporkan Inovasi pada Aplikasi IGA	80%			80%	
		Prosentase Indikator IDSD yang terpenuhi	97 Indikator			97 Indikator	
	<i>Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</i>			<i>9.023.419.334</i>			<i>12.708.758.994</i>

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
2. Membangun perencanaan daerah yang kreatif, innovative dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Perlunya peningkatan SDM perencana;
4. Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi;
6. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, maka disusulkan rencana kerja serta usulan pendanaan sebagaimana terlampir pada form 2.5

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
USULAN PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA
Per ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR			VOLUME	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA
			CAPAIAN PROGRAM	HASIL	KELUARAN		APBD KAS	TOTAL	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PONOROGO							
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai			90 %	6.602.047.100,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		95 %	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU
	5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen dan laporan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU
	5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah dokumen (Renstra, Renja, RKA)	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		90 %	5.591.139.000,00	5.591.139.000,00	
	5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah dokumen laporan keuangan	12 bulan	5.229.740.000,00	5.229.740.000,00	DAU
	5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah kegiatan pelayanan umum kantor	12 bulan	361.399.900,00	361.399.900,00	DAU
	5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang terpenuhi		90%	1.000,00	1.000,00	
	5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah penerima pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional	65 orang	1.000,00	1.000,00	DAU
	5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	0,00	0,00	-
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP		95 %	465.000.000,00	465.000.000,00	

5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	79 item	70.000.000,00	70.000.000,00	DAU
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	24 penerima	95.000.000,00	95.000.000,00	DAU
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12870 orang	167.500.000,00	167.500.000,00	DAU
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 item	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah rapat – rapat koordinasi dalam daerah dan rapat – rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	2 kali	97.500.000,00	97.500.000,00	DAU
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi		95 %	1.000,00	1.000,00	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah laporan pengadaan peralatan, perlengkapan Gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	4 laporan	1.000,00	1.000,00	DAU
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan jasa penunjang pemerintahan daerah tepat waktu		12 bulan	234.000.000,00	234.000.000,00	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah surat masuk yang dikelola	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU
				Jumlah surat keluar yang dikelola	12 bulan			
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	159.000.000,00	159.000.000,00	DAU
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	DAU
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi		95 %	291.908.100,00	291.908.100,00	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah pelayanan pajak kendaraan mobil dinas/operasional	6 Unit	187.200.100,00	187.200.100,00	DAU
				Jumlah pelayanan pajak kendaraan sepeda motor dinas/operasional				
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah laporan pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor, sarana prasarana penunjang Gedung kantor,	2 Laporan	35.020.000,00	35.020.000,00	DAU

				rumah jabatan dan rumah dinas					
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah bangunan Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	7 jenis	69.688.000,00	69.688.000,00	DAU	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Usulan Yang Diakomodir Di Dokumen Perencanaan			80 %	1.732.628.000,00			
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		90%	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00		
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik			Jumlah berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan Forum Peringkat Daerah	26 PD	35.000.000,00	35.000.000,00	DAU	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Jumlah peserta musrenbang RKPD yang hadir	400 orang	325.000.000,00	325.000.000,00	DAU	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1 dokumen	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	DAU	
				Jumlah dokumen Perubahan RKPD yang disusun	1 dokumen				
				Jumlah SKPD yang dikoordinasikan entry sistem informasi perencanaan dan penganggaran	26 PD				
				Jumlah kecamatan yang dikoordinasikan entry sistem informasi Perencanaan dan Penganggaran	21 Kecamatan				
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Prosentase dokumen perencanaan SKPD yang selaras		84 %	292.625.000,00	292.625.000,00		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Di Verifikasi	47 dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	DAU	
				Jumlah dokumen perencanaan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan	4 dokumen				
				Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti SKPD	90%				
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi RKP Per Triwulan Yang Disusun Tepat Waktu	1 laporan	127.625.000,00	127.625.000,00	DAU	
				Jumlah SKPD Yang Melaporkan Capaian Kinerjanya Tepat Waktu	47 PD				
				Prosentase Rekomendasi Pengendalian Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD	100 %				
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase efektifitas capaian sasaran pembangunan		90 %	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	

5.01.02.2.04.001	Pengelolaan Data dalam sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU
5.01.02.2.04.002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Keselarasan dokumen perencanaan</i>			92 %	1.076.556.771,00		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		92%	676.553.771,00	676.553.771,00	
5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup bidang pemerintahan	29 SKPD	157.000.000,00	157.000.000,00	DAU
				Prosentase rekomendasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh SKPD				
				Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan				
5 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Prosentase rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD dan lembaga	90 %	31.500.000,00	31.500.000,00	DAU
5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	7 SKPD	211.553.771,00	211.553.771,00	Pajak Rokok
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup sosial budaya	48 SKPD	26.500.000,00	26.500.000,00	DAU
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dibina	9 tatanan	250.000.000,00	250.000.000,00	Pajak Rokok
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Persentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup perekonomian dan SDA	82 %	175.000.000,00	175.000.000,00	DAU
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	2 SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	DAU

	Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Prosentase rekomendasi perencanaan industry, perdagangan dan koperasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD	80 %	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah dokumen penguatan ekonomi kreatif, industri perdagangan dan koperasi	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	DAU	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah dokumen SKPD yang diasistensi	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah SKPD yang di monev	1 SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana		74 %	225.003.000,00	225.003.000,00		
5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan lingkup SDA dan LH	1 SKPD	70.000.000,00	70.000.000,00	DAU	
				Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar	1 Dokumen				
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000,00	1.000,00	DAU	
5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	90 %	45.000.000,00	45.000.000,00	DAU	
				Jumlah dokumen rencana infrastruktur dasar	1 Dokumen				
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000,00	1.000,00	DAU	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	3 SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	
				Jumlah desa yang dikoordinasikan	200 desa				

					Prosentase Rekomendasi perencanaan pengembangan wilayah yang ditindak lanjuti oleh SKPD	90 %				
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1.000,00	1.000,00		DAU
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Prosentase rekomendasi perencanaan prasarana SDA dan LH yang ditindak lanjuti	90 %	45.000.000,00	45.000.000,00		DAU
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					90 %	1.025.000.000,00			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Jumlah indikator indeks daya saing daerah (IDSD)		97 indikator	150.000.000	150.000.000,00		
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						150.000.000,00	150.000.000,00		DAU
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial dan kependudukan		90%	310.000.000,00	310.000.000,00		
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial						150.000.000,00	150.000.000,00		DAU
5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						160.000.000,00	160.000.000,00		DAU
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang ekonomi dan pembangunan		90 %	310.000.000,00	310.000.000,00		
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				Jumlah dokumen Kajian pengembangan kawasan pertanian terpadu yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00		DAU
					Jumlah FS Pengembangan kawasan kopi dan kakao di selingkar Willis	1 Dokumen				
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				Jumlah dokumen kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup	1 dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00		DAU
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Indeks Inovasi daerah		90 %	255.000.000,00	255.000.000,00		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				Jumlah Inovasi yang dihasilkan OPD	50 inovasi	255.000.000,00	255.000.000,00		DAU
					Prosentase OPD yang melaporkan Inovasi pada Aplikasi IGA	80 %				
					Prosentase Indikator IDSD yang terpenuhi	97 Indikator				

BAB V PENUTUP

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan Demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda Litbang, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal: 10 Oktober 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO**



Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680413 198809 1 002

BAB V PENUTUP

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan Demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

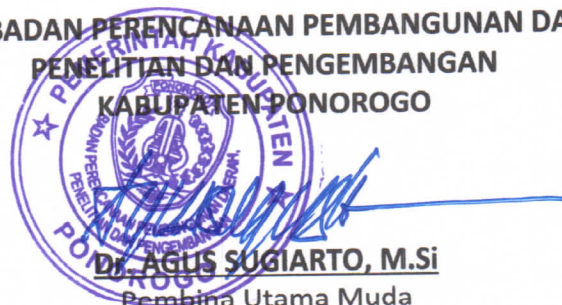
Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda Litbang, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal: 10 Oktober 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PONOROGO**



Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680413 198809 1 002